

**EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA DI LEMBANG BULULANGKAN
KECAMATAN RINDINGALLO KABUPATEN TORAJA UTARA**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:
SANTI LANGNGAN
4518021025

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululungan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Nama Mahasiswa : Santi Langngan

Nomor Stambuk : 4518021025

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 16 Agustus 2022

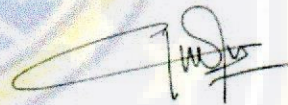
Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si.
NIDN. 0901065901



Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc.
NIDN. 0910128704

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara**

Nama : **Santi Langgan**
Nomor Stambuk : **4518021025**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian :


Dr. A. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

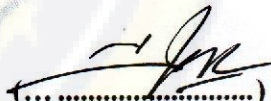
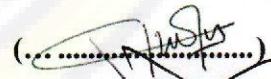
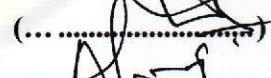

Ketua


Drs. Natsir Tompo, M.Si

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., S.Sos., M.Si
2. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc
3. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
4. Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi Langngan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau rujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawabanilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis



Santi Langngan

4518021025

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara”** guna melengkapi syarat dalam menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menyadari keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, namun dari semuanya itu penulis banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu yang berkenan dengan judul skripsi yang penulis ajukan. Dengan terbitnya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu penulis memohon dengan sangat kritikan saran guna memperbaiki skripsi ini.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni Papa Langgan dan Mama Dorkas Lepong juga semua saudara saya, yang selalu ada berjuang bersama memberikan

doa, motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan. Terimakasih atas didikan, kasih sayang, semangat yang selalu diberikan sehingga kedua orang tua menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa terselesaikan.

2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos., M.Si. Dekan FISIP Universitas Bosowa.
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Terimakasih Pak yang selalu memberikan bantuan, petunjuk, nasehat dan waktu selama proses perkuliahan sampai selesainya Skripsi ini.
5. Dr. Uddin B. Sore. S.H., S.IP., M.Si Selaku Pembimbing 1 penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasehat selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc Sebagai Pembimbing 2 penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, ilmu yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini, dalam hal ini ilmu dari mata kuliah yang berkaitan dalam memberi pemahaman mengenai penyusunan proposal/skripsi.
8. Kepala Tata Usaha beserta staffnya dilingkup FISIP Universitas Bosowa. Terimakasih atas segala bantuan selama proses perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman seperjuangan Insyah Allah Sukses yaitu Andi Novi Astri dan Sitti Aisyah yang selalu bersama melewati segala rintangan selama proses perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan Base Camp Rumah Santi (Squad Daya) yakni Tumba, Oliv, Feby, Aisyah dan Novi yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada kawan-kawan saya di UKM PMKO UNIBOS, BEM KEMA FISIP UNIBOS, HIMAN FISIP UNIBOS, PPKS Indonesia Cab. Makassar yang sudah memberikan ruang untuk belajar, terimakasih sudah banyak berkontribusi dalam proses pendidikan saya, doa dan semangatnya.
12. Terimakasih kepada keluarga besar ARASH 18 dan PREMAN 04 yang selalu berproses bersama semasa perkuliahan.
13. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa angkatan 2018 prodi Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu memberikan semangat selama proses perkuliahan.
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan di program kampus merdeka yakni Kampus Mengajar Batch 1 di UPTD SPF SD Inpres Pagandongan 1, Tim Pejuang Muda di Kepulauan Selayar dan Tim PMPR Pasar Limbung yang menjadi ruang belajar dan berkontribusi dalam proses pendidikan saya.
15. Terimakasih kepada Prada Rolanius Mayer Samsung yang selalu membantu dan memotivasi serta selama proses perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang dan berproses bersama.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis. Semoga segala bantuan , dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan anugerah dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Harapan penulis, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca, dunia pendidikan, serta bagi saya sendiri.

Makassar, 22 Agustus 2022
Penulis

Santi Langgan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori Evaluasi	10
1. Pengertian Evaluasi	10
2. Tujuan Evaluasi	13
3. Jenis dan Model Evaluasi	15
4. Konsep Evaluasi Program	18
B. Konsep Standar Operasional Prosedur	19

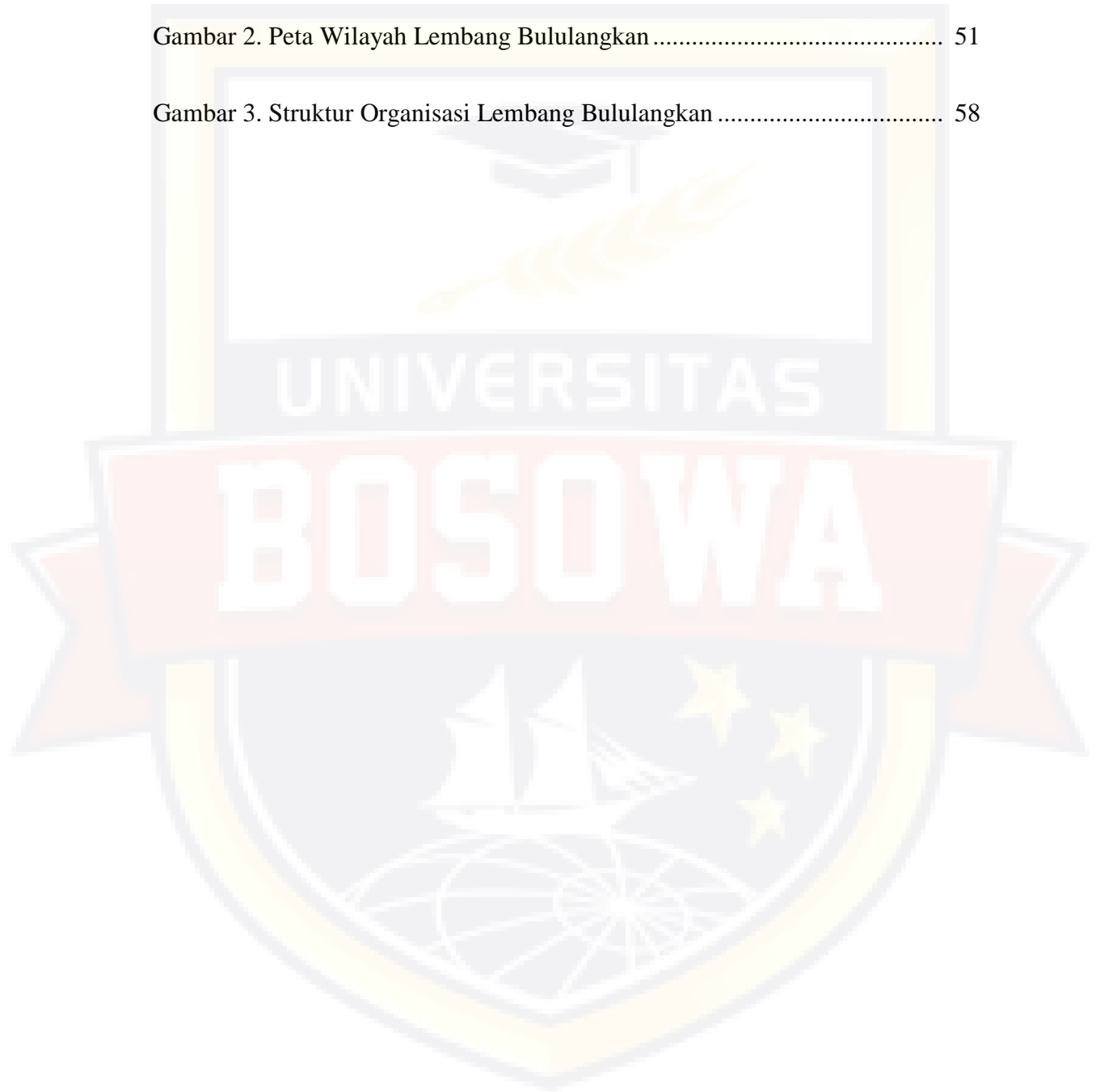
C.	Tinjauan Tentang Kebutuhan Rumah/Papan	27
1.	Standar Rumah Layak Huni	27
2.	Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman	28
3.	Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	30
D.	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.....	32
E.	Penelitian Terdahulu	36
F.	Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Deskripsi Fokus Penelitian.....	42
B.	Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	45
D.	Sumber Data	45
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Teknik Validasi data	47
G.	Informan Penelitian	49
H.	Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1.	Gambaran Umum Lembang Bululangka	51
2.	Luas Wilayah dan Kondisi Geografis	52
3.	Kependudukan	53
4.	Keadaan Sarana dan Prasarana	54

5. Visi Misi Lembang Bululangkan	57
6. Struktur Organisasi Lembang Bululangkan	58
B. Pembahasan.....	58
1. Pencapaian Tujuan Program BSPS	58
2. Proses Penyaluran Program BSPS	64
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

BOSO WA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	41
Gambar 2. Peta Wilayah Lembang Bululangkan.....	51
Gambar 3. Struktur Organisasi Lembang Bululangkan.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerlitian Terdahulu	36
Tabel 2. Jumlah Penduduk Lembang Bululangkan	54
Tabel 3. Jumlah Sarana Ibadah Lembang Bulangan	55
Tabel 4. Jumlah Sarana Pendidikan	56
Tabel 5. Data penerima BSPS Tahun 2020 di Lembang Bululangkan	60

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR SINGKATAN

BSPS: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

CPB: Calon Penerima

KPB: Kelompok Penerima Bantuan

MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

TFL: Tenaga Fasilitator Lapangan



ABSTRAK

Santi Langgan, Tahun 2022 Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa. Dibimbing oleh pembimbing I Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si dan pembimbing II Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui proses penyaluran bantuan program BPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara.

Jenis penelitian ini adalah evaluatif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan validasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program BPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara kurang maksimal. Sementara itu Proses penyaluran program BPS di Lembang Bululangkan kurang maksimal pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Kata kunci: BPS, Evaluasi, perumahan swadaya

ABSTRACT

Santi Langgan, 2022 Evaluation of the Distribution of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency, Thesis for the State Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Bosowa University. Supervised by supervisor I Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si and supervisor II Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc.

This study aims to determine the achievement of the objectives of the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency and to determine the process of distributing BSPS program assistance in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency.

This type of research is qualitative evaluative. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data validation technique used is data triangulation. Furthermore, the data analysis technique is by means of data reduction, data presentation and validation.

The results of this study indicate that the achievement of the objectives of the BSPS program in Lembang Bululangkan, Rindingallo District, North Toraja Regency is less than optimal. Meanwhile, the process of distributing the BSPS program in Lembang Bululangkan is not optimally implemented in accordance with the established rules.

Keywords: BSPS, Evaluation, self-help housing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya rumah merupakan satu kebutuhan primer setelah pangan dan sandang terpenuhi. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam juga makhluk lainnya, rumah memiliki fungsi yaitu sebagai pusat Pendidikan keluarga, pusat persemaian budayas dan sebagai peningkatan kualitas generasi muda suatu bangsa. Teori hirarki kebutuhan menurut Maslow mengemukakan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi ada lima tingkatan, diantaranya:

1. Kebutuhan fisologis, meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, tempat tidur dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan rasa aman
3. Kebutuhan sosial
4. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai dan diapresiasi seseorang, pengakuan atas factor kemampuan dan keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang.
5. Kebutuhan aktualisasi diri

Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dijelaskan bahwa tempat tinggal; dan lingkungan yang layak adalah hak setiap orang. Karena

setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU RI No.11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Sosial). Serta dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kebutuhan utama masyarakat selain sandang dan pangan adalah papan/rumah yang layak huni, mengingat bahwa rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga.

Midgley menegaskan kesejahteraan sosial sebagai: *“a state or condition of human well-being that exists when sosial problems are met, ada managed, when human needs are met, and when social opportunities are maxminixed”* (suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta Ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, Ketika kebutuhan manusia

dapat terpenuhi dan Ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley,2010).

Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan *backlog*, secara umum *backlog* perumahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antara rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan kata lain *backlog* perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tertangani. Tidak dipungkiri bahwa peningkatan angka *backlog* perumahan sangat dipengaruhi oleh adanya penambahan populasi penduduk disuatu daerah setiap tahunnya yang mana disetiap daerah jumlah kependudukannya tidak sama. Ada lima jenis kebijakan dalam memecahkan masalah kawasan kumuh:

1. Sikap *laisser fair*, pemerintah membiarkan bangunan perumahan liar mengikuti permainan ekonomi
2. Alalmis *approach*, pendekatan yang memandang bermunculan gubug-gubug reyot kaum-kaum papa sebagai ancaman
3. Pendekatan sisi (*partical approach*), pemerintah membiarkan subsidi kepada perusahaan swasta yang mendirikan perumahan bagi penduduk yang mampu membayar secara kredit.
4. Total *approach*, pendekatan yang menyeluruh, pemerintah mendirikan secara besar-besaran perumahan untuk kaum ekonomi lemah
5. Pendekatan progresif (*progresif approach*), pemecah bersama penghuninya.

Kenyataannya mewujudkan rumah yang layak huni bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup sangat kekurangan. Sehingga pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni, aman, sehat dan nyaman oleh masyarakat berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, selain itu pembangunan rumah layak huni membutuhkan biaya besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin (Hawiyah,2016).

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia salah satunya yaitu membentuk suatu kebijakan. Kebijakan publik sendiri terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi (Wahab,2014). Melalui Pemerintah Indonesia Menteri Negara Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat suatu program yang berorientasi pada pembangunan yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (selanjutnya disebut BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (selanjutnya disebut MBR) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima

bantuan itu sendiri, keluarga dan kerabat penerima bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni. Bantuan ini merupakan bantuan pemerintah yang bersifat *stimulant* sehingga diharapkan dapat mendorong keluarga penerima bantuan untuk bersama-sama keluarga penerima lainnya bergotong royong dalam memperbaiki rumah dengan dibantu oleh masyarakat sekitar.

Program BSPS merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana untuk membangun/peningkatan kualitas rumah. Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Program ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat. Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri atas pembangunan baru dan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Jika dilihat dari definisi rumah tidak layak huni yaitu: Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV, bahan dinding berupa bilik bambu, kayu atau rotan, tidak atau kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan, bahan atap berupa daun atau genteng yang sudah rapuh, rusak berat atau rusak sedang dan luas tanah tidak mencukupi standar minimal per anggota keluarga (Herlina,2021:5).

Kriteria dan persyaratan penerima BSPS menurut Peraturan Menteri PUPR No.7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

yaitu penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni
4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat
6. Bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng. KPB sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota
 - b. Anggota KPB paling banyak 20 orang
 - c. Anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama
 - d. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah

Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Namun dari hasil observasi peneliti, permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program BPS di Lembang

Bululangkan yaitu masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak, seperti yang diutarakan oleh bapak Rande warga setempat, bahwa penerima BPS di Lembang Bululangkan rata-rata merupakan warga yang berkucupan dalam hal ekonomi sedangkan warga yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mendapat bantuan padahal secara warga tersebut memenuhi persyaratan yang tertuang dalam peraturan menteri.

Oleh karena itu maka perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan program BPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dicapai. Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan evaluasi program menurut Wirawan (2012:16). Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) dan evaluasi akibat (*impact evaluation*). Teori ini sangat cocok dengan kondisi yang ada dilapangan, khususnya untuk mengevaluasi pelaksanaan program BPS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencapaian tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana proses penyaluran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara
2. Untuk mengetahui proses penyaluran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara .

D. Manfaat

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis dalam hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu karya ilmiah yang bisa memberikan beberapa ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan yang

dapat memberikan masukan yang mendukung bagi peneliti ataupun pihak-pihak yang tertarik dalam proses penelitian tentang evaluasi penyaluran program BSPS.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan agar hasil peneliti bisa memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Evaluasi program BSPS.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Menurut Subarsono (2010:119) evaluasi berarti menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Menurut Dunn (2013:601) menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan suatu program, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Evaluasi program dilakukan oleh para ahli professional pakar dengan kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan memproses suatu informasi secara berkualitas untuk melihat keberhasilan terhadap suatu program dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga organisasi dapat mengambil sebuah keputusan tentang tindak lanjut dari program tersebut.

Tayibnapi (2010:141) mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai suatu proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil-hasil pekerjaan yang menyatakan dicapai dengan yang seharusnya dicapai.

Menurut Aji (2010:30) evaluasi merupakan rangkaian usaha-usaha yang dilakukan untuk mengukur dan memberikan penilaian secara objektif terhadap pencapaian-pencapaian terhadap hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil-hasil evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menjadi umpan balik perencanaan kembali.

Menurut Winarno (2014:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun tahap hasil atau dampak dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan Langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Sedangkan pandangan lain dari Wilyam N. Dunn, 1999 (dalam Nugroho,2003) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui Tindakan publik;

evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Definisi evaluasi yang dituliskan dalam kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (AS Hornby:1986) di kutip dalam Arikunto 2010, evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung didalam definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggungjawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suchman (Wirawan, 2012) mengaitkan evaluasi dengan konteks administrasi. Suatu program evaluasi Sebagian besar tergantung pada kemanfaatannya bagi administrator dalam memperbaiki layanan dalam masyarakat. Suchman (Nugroho;2003) juga memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Suchman mengemukakan enam Langkah dalam evaluasi, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
- f. Beberapa indicator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders, 1973 (dalam Arikunto, 2010). Dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22) ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu:

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat
- b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
- c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar
- d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan
- e. Pengembangan staf program
- f. Memenuhi ketentuan undang-undang

- g. Akreditasi program
- h. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency
- i. Mengambil keputusan mengenai program
- j. Akuntabilitas
- k. Memberikan feed back kepada pemimpin dan staf program
- l. Mengembangkan teori ilmu evaluasi

Pentingnya evaluasi menurut Subarsono (2010:48) yaitu;

- a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
- b. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- c. Memenuhi aspek akuntabilitas. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada public sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah
- d. Menunjukkan kepada stakeholder manfaat sebagai suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
- e. Agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses

pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

3. Jenis dan Model Evaluasi

Ernest R. House (dalam Nugroho 2003;197) membagi model evaluasi menjadi 8 bagian yaitu, sebagai berikut:

- a. Model system, dengan indicator utama adalah efisiensi
- b. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktifitas dan akuntabilitas
- c. Model formulasi keputusan, dengan indicator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas
- d. Model tujuan bebas (goal free), dengan indicator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial
- e. Model kekritisasi seni (art criticism), dengan indicator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat
- f. Model review professional, dengan indicator utama adalah penerimaan professional
- g. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indicator utama adalah resolusi
- h. Model studi kasus, dengan indicator utama adalah pemahaman dan diversitas

Sedangkan Scriven (Wirawan,2012) membedakan model evaluasi menjadi dua yaitu:

a. Evaluasi Formatif (Formatif evaluation) yaitu evaluasi yang didesain dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan, evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur hasil pelaksanaan secara periodik
- 2) Untuk mengukur apakah kline/partisipatisam bergerak kea rah tujuan yang direncanakan
- 3) Untuk mengukur sumber-sumber yang telah dipergunakan sesuai rencana

b. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya mengukur indicator-indikator sebagai berikut:

- 1) Untuk mengukur sukses keseluruhan program
- 2) Untuk mengukur tujuan umun dan tujuan khusu progrwm telah tercapai
- 3) Untuk mengukur manfaat program

Wirawan (2012:16) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Evaluasi kebijakan

Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru: umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadi pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Istilah lain ialah analisis kebijakan, analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

b. Evaluasi program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation).

c. Evaluasi proyek

Evaluasi proyek sebagai “kegiatan aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.

d. Evaluasi material

Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah materi atau produk-produk tertentu, misalnya, untuk melaksanakan Program BPS harus diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu yang dievaluasi adalah kriteria tersebut.

e. Evaluasi sumber daya manusia

Evaluasi sumber daya manusia atau dikenal dengan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia atau human resources developmeny. Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah Lembaga Pendidikan, Lembaga pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat.

4. Konsep Evaluasi Program

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu lama. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Banyak kriteria, jenis atau model evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program. Evert Vedung (Wirawan 2012:9) mengemukakan empat kriteria dalam evaluasi program sebagai berikut:

- a. Efektif
- b. Produktivitas
- c. Efisiensi (cost-benefit)
- d. Efisiensi (cost-effectiveness)

Oemar (2003) mengemukakan bahwa model atau jenis evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan kepada penyusun program dengan cara menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka mendesain suatu program. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk meramalkan implementasi program dan kemungkinan tercapai tidaknya program dikemudian hari.
- b. Evaluasi monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa apakah program mencapai sasaran efektif. Apakah hal-hal dan kegiatan yang telah didesain secara spesifik dalam program itu terlaksana sebagaimana mestinya. Kenyataan tidak jarang program justru tidak mencapai sasaran.

B. Konsep Standar Operasional Prosedur

SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar

berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan, 2013: 86).

SOP juga menjadi jalan untuk mencapai tujuan. SOP adalah jalan atau jembatan yang menghubungkan satu titik dengan titik lainnya. Karena itu, SOP akan menentukan apakah tujuan dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis (Tambunan, 2011: 5). SOP atau yang diterjemahkan menjadi PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Ekotama, 2011: 19).

Unsur-unsur dalam standar operasional Prosedur sangat menentukan dalam efektifitas penyusunan dan penerapan SOP itu sendiri. Ketika unsur-unsur SOP diabaikan dalam suatu organisasi, maka pelaksanaan SOP itu sendiri tidak bermanfaat bagi organisasi. Unsur-unsur SOP tidak hanya bermanfaat untuk menjadi rujukan penyusunan, akan tetapi juga berguna sebagai senjata kontrol pelaksanaan penyusunan SOP, yaitu untuk melihat apakah SOP yang disusun telah lengkap atau tidak. Dalam SOP itu sendiri, unsur-unsur tersebut tidak selalu merupakan urutan-urutan yang harus dipenuhi secara lengkap, karena setiap penyusunan SOP mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam setiap organisasi (Tambunan, 2013: 140).

Adapun unsur-unsur SOP yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan SOP antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan

Pada dasarnya penyusunan SOP harus mempunyai tujuan. Tujuan penyusunan SOP harus dinyatakan jelas agar bisa menjadi landasan setiap prosedur serta langkah kegiatan yang ada di dalam SOP, termasuk keputusan-keputusan yang diambil pada saat melaksanakan suatu prosedur dan kegiatan.

2. Kebijakan

Pedoman SOP harus dilengkapi dengan pernyataan kebijakan yang terkait, yang bertujuan mendukung pelaksanaan prosedur secara efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan prosedur operasional standar bersifat spesifik untuk masing-masing prosedur.

3. Petunjuk operasional

Yang dimaksud petunjuk operasional dari prosedur adalah bagaimana pengguna akan membaca panduan prosedur operasional tersebut dengan cara benar. Bagian ini sangat penting untuk mengarahkan pengguna dalam memahami berbagai bentuk tampilan serta simbol-simbol yang digunakan didalam prosedur yang bersangkutan.

Petunjuk operasional hanya disajikan pada awal pedoman, dan tidak disajikan berulang-ulang pada setiap prosedur. Petunjuk operasional harus dinyatakan secara lengkap, konsisten, dan bahasa yang jelas. Sehingga petunjuk operasional menjadi lebih bermanfaat.

4. Pihak yang terlibat

Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu prosedur adalah pihak atau fungsi yang terlibat di dalam prosedur yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan prosedur, lebih baik menggunakan fungsi sebagai representasi dari pihak yang terlibat, daripada menggunakan nama bagian atau unit, departemen atau juga nama jabatan dan orang; yang rentan terhadap perubahan atau penggantian.

5. Formulir

Yang dimaksud formulir adalah bentuk standar dan dokumen-dokumen kosong atau lazim juga disebut blanko atau dokumen, yang lazim digunakan dalam menjalankan prosedur tertentu sebagai media yang menghubungkan tiap keputusan dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat di dalam prosedur tersebut.

Didalam SOP, formulir atau blanko atau dokumen, merupakan media validasi dan kontrol prosedur. Karena keberadaan formulir atau blanko atau dokumen di dalam suatu prosedur memiliki fungsi sebagai sumber terpenting untuk kontrol dan pelaksanaan audit, tidak hanya berfungsi sebagai media agar terlaksana relasi keputusan dan kegiatan antar pihak- pihak yang terlibat dalam prosedur. Oleh karena itu, di dalam pedoman SOP, dalam setiap prosedur, harus pula dijelaskan dengan tepat bagaimana cara pengisian setiap formulir yang digunakan dalam prosedur yang bersangkutan.

6. Masukan

Setelah formulir sebagai media masukan disiapkan, maka kegiatan di dalam sistem dapat dilakukan, dengan asumsi bahwa kualitas data sudah memenuhi persyaratan sesuai yang dinyatakan dalam kebijakan ataupun syarat prosedur.

7. Proses

Proses adalah tahapan lanjutan setelah tahapan masukan dalam prosedur. Proses dapat terdiri dari satu atau lebih subproses. Hal ini juga dapat terjadi pada prosedur suatu organisasi. Proses (dan sub proses) adalah kegiatan yang bertujuan mengubah masukan menjadi keluaran. Data dan informasi di dalam masukan diubah menjadi informasi dan knowledge yang dibutuhkan oleh organisasi untuk pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

8. Laporan

Laporan yang dimaksud dalam SOP harus dibedakan dengan formulir, blanko, atau dokumen. Laporan dalam suatu prosedur, biasanya sangat spesifik dan tidak akan sama dengan laporan yang diproduksi di dalam prosedur lainnya.

9. Validasi

Validasi adalah bagian yang penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan di dalam organisasi. Tujuan dari melakukan validasi adalah untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil dan kegiatan yang dilakukan telah sah (valid).

10. Kontrol

Kontrol dapat dibagi dengan berbagai cara. Ada yang menurut spesifikasinya, prosedur, kepatuhannya, dan sebagainya. Untuk dapat menerapkan SOP dan prosedur- prosedur, maka kontrol yang diterapkan harus mencakup semua bentuk kontrol tersebut (Tambunan, 2013: 142-165).

SOP disusun dan disajikan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Menjamin keandalan pemrosesan dan produksi laporan yang dibutuhkan organisasi.
3. Menjamin kelancaran proses pengambilan keputusan organisasi secara efektif dan efisien.
4. Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegiatan yang dapat mencegah terjadinya penyelewengan maupun penggelapan oleh anggota organisasi maupun pihak-pihak lain (Tambunan, 2013: 143).

Sebagai sebuah pedoman, SOP berperan dalam memberikan acuan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi agar berjalan efektif, sehingga membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Secara terperinci, peran dan manfaat SOP sebagai pedoman didalam suatu organisasi adalah:

1. Menjadi pedoman kebijakan

Sebagai suatu pedoman kebijakan merupakan peran dan manfaat pertama SOP bagi organisasi. SOP yang efektif pastilah disusun dengan berdasarkan kebijakan yang ada dalam organisasi. Kebijakan-kebijakan ini menjadi sumber prosedur operasional standar. Jadi, boleh dikatakan bahwa, SOP adalah bentuk praktis kebijakan-kebijakan organisasi. Dan SOP menjadi sangat penting bagi organisasi untuk membuat kebijakan-kebijakan organisasi menjadi aplikatif atau layak terap dan mencapai manfaat yang optimal bagi organisasi.

2. Menjadi pedoman kegiatan

Dengan memiliki SOP, organisasi berharap bisa mengatur kegiatankegiatannya dengan lebih efektif (Tambunan, 2013: 108). SOP yang efektif harus mampu menyederhanakan setiap pekerjaan agar tidak mempersulit orang yang berhubungan dengan kegiatan tersebut atau orang yang membutuhkan hasil dari kegiatan tersebut. Sebagai pedoma2n kegiatan, SOP harus berperan mengulangi pengulangan kerja yang tidak perlu.

Karena pengulangan kerja adalah bentuk lain dari ketidak efektifan. Jadi, sebagai pedoman kegiatan, SOP harus berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan dalam kondisi apapun.

3. Menjadi pedoman birokrasi

Dengan penerapan SOP, seharusnya birokrasi kegiatan menjadi lebih jelas dan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini, peran dan manfaat

ini, terkait dengan anggota-anggota organisasi pada tingkatan jabatan yang mempunyai wewenang birokrasi. SOP, diharuskan menggambarkan setiap titik pengesahan birokrasi sebagai kontrol keabsahan langkah-langkah kegiatan (Tambunan, 2013: 109-110).

4. Menjadi pedoman administrasi

Dengan diterapkannya SOP, maka sudah seharusnya organisasi mampu menyelenggarakan administrasi kegiatan secara baik. Sangat penting bagi organisasi untuk menyelenggarakan administrasi secara baik, sebab banyak bukti praktis yang menunjukkan bahwa kemampuan operasional yang baik, tidak ada gunanya tanpa administrasi yang baik (Tambunan, 2013: 112).

5. Menjadi pedoman evaluasi kinerja.

Dengan penerapan SOP, organisasi akan mempunyai ukuran kinerja yang lebih baik. Evaluasi kinerja yang dilaksanakan dengan penerapan SOP, merupakan ukuran ketaatan (compliance) kepada prosedur. Ukuran ketaatan ini, apabila berjalan secara optimal dapat membantu organisasi untuk mengurangi terjadinya penggelapan dan penyelewengan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya (Tambunan, 2013: 113).

Evaluasi kinerja yang dilakukan intensif dan teratur, dapat membantu menilai efektifitas dan efisiensi SOP, dan meningkatkan kinerja organisasi yang bersangkutan.

6. Menjadi pedoman integrasi

Melalui penerapan SOP, diharapkan organisasi memiliki rangkaian alur kerja yang terpadu satu dengan yang lainnya. Tidak ada gunanya memiliki dan menerapkan SOP apabila prosedur-prosedur yang terdapat dalam organisasi berdiri sendiri, dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih atau ada banyak penggunaan dokumen dan formulir yang berulang, terdapat banyak laporan-laporan yang tidak termanfaatkan secara optimal, terjadi distribusi laporan-laporan yang tidak tepat atau malah tidak ada standar dalam penerapan prosedur (Tambunan, 2013: 115).

C. Tinjauan Tentang Kebutuhan Rumah/papan

1. Standar Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan Kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan Habitat for Humanity Indonesia, terdapat 3 point penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah dikatakan sebagai rumah layak huni.

a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan

Poin pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan atau ring balk, serta struktur atas bangunan atau atap.

Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dengan kompetensi bangunan yang tertuang dalam sertifikasi dan standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut. Peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir.

b. Menjamin Kesehatan bagi para penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, poin penting kedua yang harus terpenuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin Kesehatan para penghuninya. Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan.

c. Memenuhi kecukupan luas minimum

Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan Gedung dan dapat menjamin Kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serba guna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

2. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman

Suprijanto (2004) Ada tiga kebijakan dan strategi nasional yaitu:

- a. Melembagakan system penyelenggaraan perumahan dan pemukiman dengan melibatkan masyarakat (partisipatif) sebagai pelaku utama, melalui strategi;

1) Penyusunan pengembangan dan sosialisasi berbagai produk peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman

2) Pemantapan kelembagaan perumahan dan permukiman yang handal

3) Pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan

b. Mewujudkan kebutuhan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, melalui strategi;

1) Pengembangan system pembiayaan dan pemberdayaan pada perumahan (primer dan sekunder)

2) Pengembangan pembangunan perumahan yang bertumpu keswadayaan masyarakat

3) Pengembangan berbagai jenis dan mekanisme subsidi perumahan, dapat berbentuk subsidi pembiayaan, subsidi prasaran dan sarana dasar lingkungan perumahan dan perumahan ataupun kombinasi kedua subsidi tersebut.

4) Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin

5) Pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman akibat dampak bencana alam dan kerusuhan social.

6) Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara, melalui pembinaan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan asset bangunan gedung dan rumah negara.

c. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian dan produktivitas masyarakat, melalui strategi;

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dengan memprioritaskan Kawasan permukiman kumuh di perkotaan pesisir
- 2) Pengembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman
- 3) Penerapan tata lingkungan pemukiman

3. Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kebijakan perumahan dan permukiman di Indonesia pada awalnya atau sebelum merdeka (Pra Kemerdekaan) masih terbatas pada penyediaan perumahan hanya untuk pegawai negeri, rumah sewah dan perbaikan lingkungan dalam rangka Kesehatan. Sementara pelaksanaan lebih lanjut mengenai kebijakan perumahan dan permukiman masyarakat ada waktu tersebut dijalankan melalui Burgerlijke Woningenregeling 1934 yang pelaksanaan yang menggunakan Algemene Voorwaden voor de uitvoering bij aaneming van Openbare Werken in Indie 1941 seta Indische Comptabiliteits wet. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh Departement Van Vekerr en Waterstaat yang menangani perumahan rakyat dan bangunan gedung rumah tangga (Yosita,2012).

Tujuan pokok pembangunan permukiman dan perumahan adalah meningkatkan kesediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapat rendah, dan meningkatkan system permukiman yang teratur, layak huni, budaya, ramah lingkungan, dan efisien, yang dapat mendukung produktivitas dan kreativitas masyarakat, serta meningkatkan sumber kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.

Adisasmita (2015) menyatakan ntuk mencapai tujuan diatas, strategi kebijakan dalam pembangunan permukiman dan perumahan yang dilakukan adalah:

- a. Pembangunan institusi pembiayaan primer dan sekunder dalam pembangunan perumahan dan permukiman
- b. Mengembangkan system penyediaan pembangunan dan perbaikan hunian yang layak
- c. Mengembangkan system subsidi hunian bagi masyarakat miskin
- d. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan agar supaya tidak berlebihan.

Subsidi perumahan adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah menengah kebawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi selsisih bunga,

penambahan dana pembangunan, perbaikan rumah (Kusumastuti,2015).

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara mandiri maupun berkelompok. Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah atau pemerintah daerah (Santoso,2004).

D. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 pasal 1 tentang perumahan, rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sebagai sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Jadi dalam mewujudkan rumah yang sesuai dengan fungsinya tersebut perlu adanya dorongan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman. Dalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman adalah upaya yang dilakukan oleh menteri, Gubernur dan Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini merupakan salah satu program Bantuan Sosial pemerintah pusat dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak

huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan dana yang bersifat material bangunan.

Yang menjadi latar belakang terbentuknya dan munculnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 47 Tahun 2015 tentang penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Keswadayaan Masyarakat

Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat stimulant dalam rangka peningkatan kualitas rumah agar layak huni, sehingga untuk mencakup kualitas kelayakan rumah supaya dapat dihuni diperlukan adanya komitmen dan kesiapan dari masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun asset lain atau tabungan yang bisa dijadikan tambahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat agar dalam setiap kegiatan pelaksanaan yang dimulai dari merencanakan, membangun dan mengelola pelaksanaan

kegiatannya, serta mengawasi sangat diharapkan partisipasi masyarakat sendiri dengan rasa tanggung jawab.

3. Transparan

Kegiatan ini dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat dan aparatur sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

4. Dapat dipertanggungjawabkan

Kegiatan ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Pembangunan Mandiri Pasca Kegiatan

Pembangunan mandiri pasca konstruksi merupakan kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesai program, yang dilakukan atas inisiatif dan dengan dana dari masyarakat sendiri.

Kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri PUPR No.7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni

4. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
5. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng. KPB sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota
 - b. Anggota KPB paling banyak 20 orang
 - c. Anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama
 - d. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah

Adapun tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Menyediakan instrument penyelenggaraan perumahan swadaya yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Hal ini dilakukan untuk mempercepat tersedianya rumah layak huni dalam lingkungan sehat, tertib, aman dan nyaman dengan cara terjangkau

2. Mendorong swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dengan adanya program ini dapat memfasilitasi dan mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilakukan secara swadaya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Adapun sasaran fungsional kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah terselenggaranya pemberian dukungan, dorongan, fasilitas bagi pembangunan dan pengembangan perumahan swadaya secara tertib, tepat sasaran, tepat penggunaan, dan tepat waktu secara berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian “Evaluasi Penyaluran Bantuan Program Bedah Rumah di Lembang Bululungan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara”, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Lela Aggraini (2017)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada masyarakat	Kualitatif	Menurut tinjauan Fiqh Muamalah program bedah rumah pada masyarakat miskin di Desa Air Limau masih belum sesuai dikarenakan ketidakadilan seorang pemimpin dalam memilih objek dan subjek

		<p>miskin di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim</p>		<p>yang tepat sehingga apa yang terjadi dilapangan menyebabkan kecemburuan sosial karena masyarakat yang seharusnya masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah tergeser oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan aparatur desa walaupun masuk dalam kriteria bantuan bedah rumah.</p>
2.	<p>Cahya Ningtyas (2018)</p>	<p>Pengelolaan Bantuan Stiuilan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kelurahan Rejomulyo</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Rejomulyo sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan. Hal ini dibuktikan denga</p>

				<p>temuan dilapangan bahwa pad tahap pengajuan proposal pencairan bantuan terdapat masyarakat yang menerima bahan bangunan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya.</p>
3.	<p>Cahyaning Imaniar Brilian (2017)</p>	<p>Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dikatakan baik. Dalam implementasi program BSPS untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah komunikasi dan</p>

				<p>Kerjasama antar actor pelakasana program sedangkan factor penghambat yaitu sumber daya manusia dan ketepatan sasaran terhadap program tersebut.</p>
4.	<p>Arif Budi Setiawan (2018)</p>	<p>Analisis pelaksanaan Bantua Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Rokan Hulu</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Pelaksanaan program bantuan stimulant perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Rokan hulu sesuai dengan pereaturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No.47 Tahun 2015. Kegiatan dilaksanakan dengan swadaya masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan oengembangan</p>

				<p>mandiri pasca kegiatan.</p> <p>Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala diantaranya keterbatasan swadaya masyarakat, menerima bantuan berada pada katategori lanjut usia, tingkat Pendidikan yang tergolong rendah.</p>
--	--	--	--	---

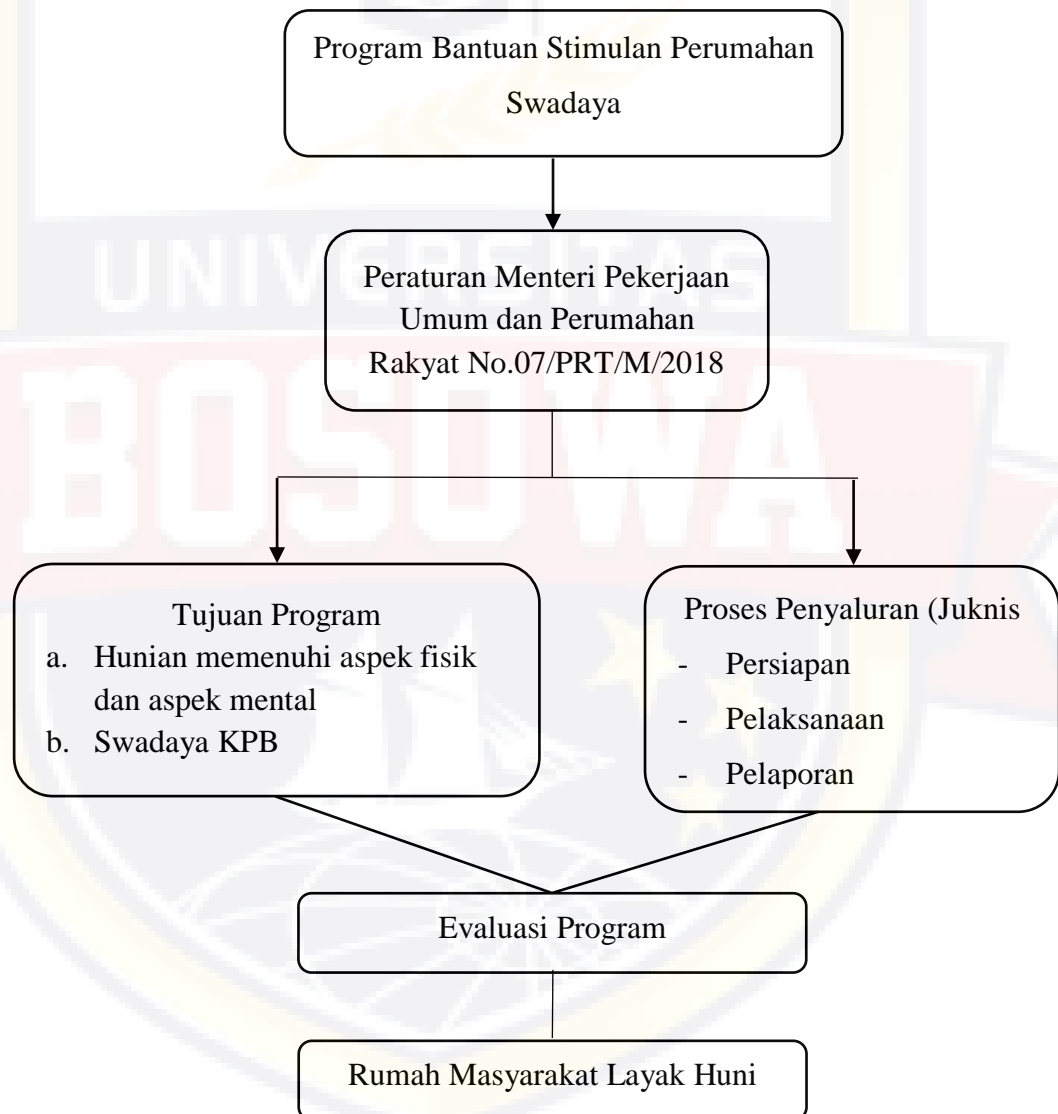
F. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara, maka peneliti membuat kerangka pikir untuk menjadi panduan dalam penelitian ini sehingga tujuan penelitian tercapai dengan baik.

Evaluasi diartikan sebagai tahapan penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasil dideskripsikan dalam bentuk informasi. Sejalan dengan teori evaluasi program menurut Wirawan yang membagi evaluasi dalam tiga tahapan yaitu proses, manfaat dan dampak.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar pembahasan mengarah pada tujuan dan mempermudah proses pengolahan data, maka perlu ditetapkan fokus penelitian terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Evaluasi Program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Program BSPS memiliki tujuan yaitu:

1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

Adi dalam (Tri,2014) mengemukakan bahwa RTLH adalah rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat perlindungan secara mental memenuhi rasa kenyamanan.

2. Mendorong swadaya masyarakat berpenghasilan rendah

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam hal ini diharapkan MBR dapat melaksanakan fungsi gotong royong, tanggungjawab renteng, serta membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam

melaksanakan program BSPS. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah KPB saling berswadaya untuk memperbaiki rumah penerima BSPS.

Untuk mengetahui indikator tersebut penulis akan mendapatkan data dengan melakukan observasi dan mewawancarai penerima bantuan dan pelaksana BSPS di Lembang Bululangkan.

Dalam pelaksanaan program tentunya harus ada standar operasional yang jelas agar implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Adapun proses penyaluran BSPS ini yaitu:

- a. Pesiapan, pada tahapan ini memuat proses pengusulan kegiatan, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat dan penetapan calon penerima.
- b. Pelaksanaan, pada tahapan ini memuat proses pencairan, penyaluran, pemanfaatan bantuan.
- c. Pelaporan

Untuk melihat indikator tersebut maka penulis akan melakukan wawancara penerima BSPS dan pemerintah terkait di Lembang Bululangkan..

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas social, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

kelompok, penelitian kualitatif yang datanya diambil dari lapangan penelitian lebih menekankan analisisnya terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif biasanya digunakan pada penelitian dalam bidang social. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan latar dan individu tersebut secara utuh dan tidak mengisolasi individu kedalam variable, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluatif. Metode penelitian evaluatif adalah suatu penelitian yang menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria, tolak ukur, atau standar yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh, setelah data tersebut diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Penelitian evaluatif ini bermaksud mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan (Arikunto,2010;36). Penelitian ini menggunakan pola pikir khusus dan menarik keadaan simpulan umum sehingga menggambarkan tentang “Evaluasi Penyaluran Bantuan Program Bedag Rumah di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara”.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Untuk mendapatkan hasil dan data yang lengkap serta valid, membutuhkan waktu dan tenaga kurang lebih 21 hari lamanya. Lokasi Penelitian yaitu di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang mengadakan program bedah rumah dan peneliti membutuhkan informasi mengenai program bedah rumah dari beberapa kalangan di tempat tersebut untuk memperoleh data yang lebih akurat.

D. Sumber Data

Data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang sehubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara

lain, laporan, arsip, dokumen, serta dari berbagai kepustakaan yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah langkah awal dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena, sasaran dari observasi ini ialah menemukan adanya masalah yang dihadapi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara. Yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam proses ini penulis melakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (bincang-bincang) dengan pihak yang terkait dengan penyaluran BSPS di Lembang Bululangka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data sumber data tertulis, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dalam pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen-dokumen, buku pedoman dan arsip yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara serta foto-foto yang mendapat bantuan.

F. Teknik Validasi Data

Teknik uji validasi data yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada tiga macam triangulasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi dengan Sumber

Membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan Pengecekan keabsahan data ditriangulasi sumber ini peneliti membandingkan sumber data dari satu informan dengan informan lainnya yang diwawancarai di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Selain itu juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang diberikan.

2. Triangulasi dengan Metode

Terdapat tiga strategi yaitu: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (3) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

Pada triangulasi metode ini peneliti membandingkan hasil pengamatan data-data yang telah diperoleh dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Triangulasi dengan Teori

Menurut Patton, berdasarkan anggapan bahwa fakta dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori, hal ini dinamakan penjelasan pembandingan (rival explanation). Jika analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan atau penyaing. Melaporkan hasil penelitian disertai penjelasan sebagaimana yang dikemukakan jelas akan menimbulkan derajat kepercayaan data yang diperoleh.

Melalui teknik triangulasi teori peneliti membandingkan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai referensi pembandingan guna mendapatkan sebuah gambaran teori yang paling sesuai.

G. Informan Penelitian

Informan dikatan sebagai seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu dan dapat memperoleh informasi yang terakurat, terpercaya, baik berupa pernyataan, keterangan, ataupun data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Staff Bid. Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (1 Orang)
2. Kepala Lembang Bululangkan (1 Orang)
3. Kepala Seksi Kesejahteraan (1 Orang)
4. Masyarakat Penerima BSPS (10 Orang)

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian atau dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data yang dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian.

Untuk menganalisis berbagai fenomena di lapangan dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi

2. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian

3. Penyajian data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif.

4. Tahap akhir

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang teruji validitasnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lembang Bululangkan

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu pemerintahan kota dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah 1.151,47 km² dan terbagi atas 21 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Sopai, Kecamatan Kesu, Kecamatan Sanggalangi, Kecamatan Buntao, Kecamatan Rantebua, Kecamatan Nanggala, Kecamatan Tondon, Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Rantepao, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sesean, Kecamatan Balusu, Kecamatan Sadan, Kecamatan Bangkele Kila, Kecamatan Sesean Suloara, Kecamatan Kapala Pitu, Kecamatan Dende Pionhgan Napo, Kecamatan Awan Rante Karua, Kecamatan Rindingallo, Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Barupu. Kecamatan Rindingallo terdiri 2 kelurahan dan 7 Lembang yaitu Kelurahan Pangala', Kelurahan Pangala Utara, Lembang Rindingallo, Lembang Bululangkan, Lembang Ampang Batu, Lembang Lo'ko'Uru, Lembang Buntu Bantu, dan Lembang Mai'ting.

Lembang Bululangkan adalah salah satu lembang yang berada di Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 9.40 km²

Luas wilayah Kecamatan Rindingallo dengan total luas wilayah 74.25 km² dengan rincian tiap kelurahan/lembang sebagai berikut:

- a. Kelurahan Pangala : Luas wilayah 6.53 Km²
- b. Kelurahan Pangala Utara : Luas wilayah 9.68 Km²
- c. Lembang Rindingallo : Luas wilayah 6.63 Km²
- d. Lembang Lo'Ko'Uru : Luas wilayah 10.59 Km²
- e. Lembang Ampang Batu : Luas wilayah 7.24 Km²
- f. Lembang Lempo Poton : Luas wilayah 10.50 Km²
- g. Lembang Bululangkan : Luas wilayah 9.40 Km²
- h. Lembang Mai'ting : Luas wilayah 7.35 Km²
- i. Lembang Buntu Batu : Luas wilayah 6.33 Km²

Ditinjau dari segi orbitasi pusat pemerintah Kecamatan Rindingallo dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah relative terjangkau dari segi perhubungan atau komunikasi dengan jarak \pm 21 Km.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara mempunyai 254 Kartu Keluarga, dengan jumlah penduduk 993 orang. Yang tersebar di 4 dusun dengan perincian tabel.

Tabel 2. Jumlah penduduk Lembang Bululangkan

No	Dusun	KK	Jumlah anggota keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
1.	Lo'ko'Lemo	112	-	155	185	340
2.	Baroko	45	168	67	101	168
3.	Tiroallo	41	197	101	98	199
4.	Batu Mendaun	56	286	153	133	286
	Jumlah	254		476	517	993

(Sumber: Arsip Lembang Bululangkan 2022)

Jumlah Penduduk miskin di Lembang Bululangkan yaitu 489 jiwa dan jumlah rumah tangga miskin 181 KK. Kemudian jumlah rumah layak huni sebanyak 201 unit serta rumah tidak layak huni berjumlah 51 unit.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Lembang Bululangkan

a. Sarana Tempat Ibadah

Rumah ibadah merupakan sebuah tempat yang digunakan oleh umat bergama untuk beribadah menurut ajaran masing-masing. Untuk melihat sarana tempat ibadah keagamaan di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Sarana Ibadah

No	Rumah Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Islam	-
2.	Protestan	8
3.	Katolik	1
4.	Buddha	-
5.	Hindu	-
6.	Agama lainnya	-
	Jumlah	9

(Sumber : Arsip Lembang Bululangkan 2022)

b. Sarana Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan

Pentingnya kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi acuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera karena apabila seseorang itu sehat dapat dilakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu, untuk menunjang tercapainya masyarakat yang sehat maka diperlukan sarana dan prasarana serta profesi-profesi dibidang kesehatan dalam penanganan langsung mengenai masalah kesehatan. Di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo memiliki 1 Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Tidak kalah penting dengan kesehatan, pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang harus mendapatkan perhatian

husus demi menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan usaha untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terwujud. Oleh karenanya sarana dan prasarana di bidang pendidikan merupakan salah satu pendukung untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Berikut ini sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1.	TK	3
2.	SD/Sederajat	2
3.	SMP/Sederajat	1
4.	SMA/Sederajat	-
	Total	5

(Sumber: Arsip Lembang Bululangkan 2022)

Dari data yang ada pada tabel dapat kita lihat dan dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo ada sarana pendidikan TK sebanyak 3 unit, sarana pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 2 unit, sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sebanyak 1 unit sementara untuk sarana Sekolah Menengah Atas tidak ada sama sekali.

5. Visi Misi Lembang Bululangkan

a. Visi

Meningkatkan pembangunan Lembang Bululangkan yang berdaya saing, aman, berbudaya dan berakhlak mulia

b. Misi

1) Membentuk dan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat yang meliputi:

a) Pemberdayaan SDM yang terutama perempuan (PKK) dan meningkatkan karang taruna

b) Pemanfaatan SDA

2) Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, rukun, dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada.

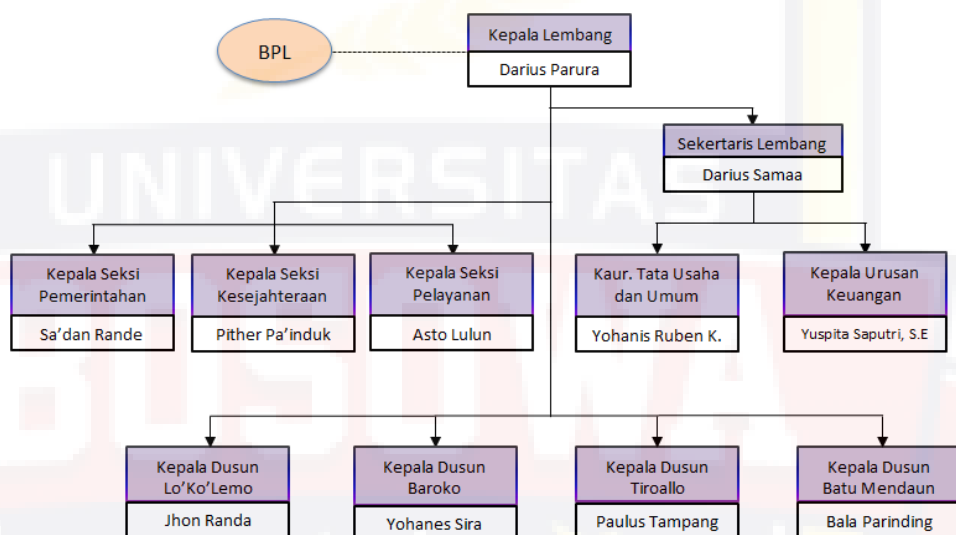
3) Memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah lembag meliputi:

a) Pelayanan kepada masyarakat yang transparan, adil, dan tepat.

b) Pelaksanaan pembangunan lembang yang berkesinambungan dengan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat, serta bersinergitas atau kerjasama dengan BPL

- c) Mengedepankan kejujuran, keadilan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintah maupun dengan masyarakat.

6. Struktur Organisasi/Lembaga Lembang Bululangkkn



Gambar 3. Struktur Organisasi Lembang Bululangkkn

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan hasil analisis dan fakta yang ditemukan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan.

1. Pencapaian Tujuan Program BPS di Lembang Bululangkkn Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai individu atau kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk

terukurnya efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya.

Dalam menentukan pencapaian tujuan program BPS di Lembang Bululangkan, terdapat dua indikator yang digunakan yaitu meningkatkan kualitas RTLH dan mendorong MBR untuk berswadaya. Kedua indikator ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian PUPR dalam melaksanakan progra BPS.

a. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Peningkatan kualitas RTLH adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Adi dalam (Tri,2014) mengemukakan bahwa RTLH adalah rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat perlindungan secara mental memenuhi rasa kenyamanan.

Kementerian PUPR menentukan tujuan program mewujudkan rumah layak huni perlu didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana dan berkelanjutan yang disalurkan di Lembang Bululangkan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Toraja Utara. Salah satu upaya mewujudkan rumah layak huni adalah dengan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kepada MBR.

Tabel 5. Data penerima BPS Tahun 2020 di Lembang Bululangkan

No.	Nama	No.	Nama
1.	Allo Supan	14.	Lince Tandi
2.	Antonius Duma'	15.	Luter Rande
3.	Aris	16.	Markus Londong
4.	Efa Tangmaki' Lolong	17.	Martha Katta
5.	Elfi Parrangan	18.	Marthen Sambo
6.	Eni Londong	19.	Marthen Shulo
7.	Ezra Samaa	20.	Marthen Pongpare
8.	Herman Sesa Payung	21.	Matius Kende
9.	Ishak Rande	22.	Nani' Tappi'
10.	Jhon Randa	23.	Barrang
11.	Jupri Kondolele	24.	Markus Allo Datu
12.	Kombong	25.	Lius Saleppang
13.	L. Somboallo		

(Sumber: Arsip Lembang Bululangkan 2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah MBR yang menerima BPS pada tahun 2020 adalah 25 orang.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan

konfirmasi lebih lanjut mengenai jumlah MBR yang memperoleh BSPS kepada kepala Lembang Bululangkan, beliau mengatakan:

“Pada tahun 2020 jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan sebanyak 25 penerima yang tersebar di empat lingkungan yakni 6 penerima di Dusun Baroko, 3 penerima di Dusun Tiroallo, 12 penerima di Dusun Lo’ko’ Lemo, dan 4 penerima di Dusun Batu Mendaun.”(Darius, 11 Juli 2022)

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada penerima BSPS terkait perubahan nyata yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan. Berikut pernyataan dari SA:

“Setelah mendapatkan program ini saya merasa lebih tenang, ketika hujan tidak perlu khawatir air hujan merembes karena sudah diperbaiki” (12 Juli 2022)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh EL:

“Sebelumnya rumah ini sudah sangat rapuh tiangnya, tapi syukur saya dapat bantuan ini untuk memperbaiki rumahnya” (11 Juli 2022)

Pada temuan dilapangan setelah pelaksanaan program ini MBR yang mendapatkan Program BSPS telah menempati rumah dengan aspek fisik dan mentalnya telah memenuhi SNI.

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa keberhasilan tujuan untuk indikator peningkatan kualitas rumah tidak layak huni telah tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan MBR di Lembang Bululangkan.

b. Mendorong Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Dalam hal ini diharapkan MBR dapat melaksanakan fungsi gotong royong, tanggungjawab renteng, serta membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan program BSPS (Juknis penyelenggaraan BSPS No.7 Tahun 2018). Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah KPB saling berswadaya untuk memperbaiki rumah penerima BSPS.

Untuk mengetahui tentang KPB di Lembang Bululangkan Penulis melakukan wawancara dengan penerima BSPS, berikut pernyataan dari AS:

“Iya ada kelompok dibentuk fasilitator dan kepala lembang, untuk Dusun Baroko, Dusun Tiroallo dan Dusun Batu Mendaun itu satu kelompok kalau Lo’ko’Lemo itu satu kelompok karena banyak penerimanya disitu.” (12 Juli 2022)

Hal ini perkuat oleh pernyataan DA selaku kepala lembang Bululangkan:

“Ada dua kelompok yang dibuat, untuk Dusun Lo’Ko’Lemo itu ketuanya Bapak Jhon Randa dan Dusun Baroko, Dusun Tiroallo serta Dusun Batu Mendaun ketuanya Jupri.” (11 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas ada 2 KPB yang dibentuk oleh pemerintah setempat. Hal ini telah sesuai dengan salah satu persyaratan untuk memperoleh bantuan ini.

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepada penerima BSPS terkait keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Berikut pernyataan dari AS:

“Kalau perbaikan kemarin kami tidak melakukan gotong royong, kerja sendiri-sendiri karena tidak ada pemberitahuan seperti itu.” (12 Juli 2022)

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh MA:

“Tidak ada yang membantu, tukang yang mengerjakan dan melakukan perbaikan lalu kami beri upah. Masyarakat disini melakukan perbaikan secara mandiri.” (12 Juli 2022)

Namun pada temuan dilapangan pembentukan KPB untuk melakukan swadaya dalam perbaikan rumah belum tercapai di Lembang Bululungan yang mengakibatkan pelaksanaan program BSPS tidak berjalan semestinya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih minimnya peran serta KPB untuk berswadaya dalam pelaksanaan perbaikan rumah. Padahal pelaksanaan BSPS vmenekankan pada pemberdayaan masyarakat secara swadaya untuk menunjang keberhasilan program ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk dari fasilitator kepada KPB untuk melakukan swadaya

2. Proses Penyaluran Program BPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara

Dalam pelaksanaan program tentunya harus ada standar operasional yang jelas agar implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun setelah melakukan wawancara dengan pegawai bidang perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara selaku pelaksana program BPS di Lembang Bululangkan menyatakan bahwa proses penyaluran program BPS ini hanya mengacu pada Surat Edaran No.7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berikut pernyataan WP selaku pegawai yang menangani program BPS:

“SOP kami belum ada karena ada perubahan dinas sehingga belum selesai sampai sekarang, jadi untuk sekarang kami hanya mengacu pada juknis di kementerian”(14 Juli 2022)

Adapun petunjuk teknis menurut Surat Edaran Kementerian PUPR No.7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pertama yaitu persiapan
 - 1) Pengusulan Kegiatan BPS
 - 2) Penetapan Lokasi
 - 3) Penyiapan Masyarakat
 - a) Sosialisasi/penyuluhan

- b) Verifikasi calon penerima
 - c) Kesepakatan calon penerima bantuan
 - d) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal
- 4) Penetapan Calon Penerima
- b. Tahapan kedua yaitu pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan berupa uang (pencairan, penyaluran, pemanfaatan bantuan)
 - 2) Pelaksanaan berupa barang
 - c. Tahapan ketiga yaitu pelaporan

Pegawai yang menangani program BSPS pada Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Kehutanan Toraja Utara menyatakan bahwa:

“Pertama kami melakukan pengusulan kegiatan melalui pemerintah daerah setelah itu melakukan penetapan lokasi. Tidak semua daerah di Toraja Utara mendapatkan program BSPS setiap tahun. Misalkan tahun 2020 dilakukan program BSPS di Lembang Bululangka kemudian di tahun 2021 kami mengusulkan lokasi di Tallunglipu. Jadi semua tergantung daerah prioritas dan disesuaikan dengan verifikasi usulan pemerintah daerah.” (WP,14 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan pada tahapan pengusulan kegiatan BSPS dan penetapan lokasi telah sesuai dengan petunjuk teknis No.7 tahun 2018. Pada tahap pengusulan kegiatan BSPS pun telah melakukan verifikasi usulan berdasarkan tingkat kemiskinan kabupaten serta program prioritas pemerintah.

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan penerima program BSPS di Lembang Bululangkan:

“saya tidak tau sama sekali apa itu BSPS, waktu itu saya hanya diberitahukan langsung oleh pemerintah setempat bahwa saya mendapat bantuan ini akan ditinjau oleh fasilitator dalam waktu dekat. Pada saat ada fasilitator datang beliau meminta KTP dan KK kemudian mengecek kondisi rumah” (NI, 12 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sama tidak mengetahui tentang program bantuan ini. Pernyataan yang sama pula disampaikan oleh MA:

“untuk pemberitahuan tidak ada, tapi ada fasilitator datang mengambil beberapa dokumentasi dan katanya untuk beda rumah tapi untuk selebihnya tidak ada” (12 Juli 2022).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penerima bantuan langsung melakukan verifikasi kepada penerima namun belum melakukan pertemuan sebelumnya. Selanjutnya disampaikan oleh IK:

“Tidak ada sosialisasi, saya bahkan tidak tahu program ini tapi ternyata data saya diajukan dan syukur saya dapat. Namun waktu peninjauan langsung disini kata fasilitator saya sudah tidak layak menerima bantuan ini karena kondisi rumah dinilai masih cukup bagus. Tapi karena nama saya sudah ada dalam daftar penerima jadi tidak bisa diubah” (12 Juli 2022)

Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Lembang Bululangkan yakni:

“Kondisi masyarakat disini cepat mengambil kesimpulan ketika mengikuti hal tersebut(sosialisasi), masyarakat berasumsi bahwa jika mengikuti sosialisasinya maka mereka sudah bisa mendapat bantuan tersebut padahal ada beberapa proses yang harus kita lakukan dalam menentukan penerima program BSPS. Maka dari itu kami tidak melakukan sosialisasi tetapi langsung memberikan data kepada fasilitator. Untuk sekarang ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti sembako, uang tunai dll. Data yang kami berikan itu memang tidak kami masukkan semua yang memiliki rumah tidak layak huni contohnya yang sudah menerima bantuan sembako tidak kami masukkan datanya karena ditakutkan adanya kecemburuan karena menerima bantuan dua kali meskipun sumber berbeda tapi masyarakat kurang paham akan hal itu” (PT, 11 Juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahap penyiapan masyarakat tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Pada tahap ini tidak dilakukan sosialisasi dan penyuluhan dan juga kesepakatan calon penerima bantuan, sementara pada setiap proses ini sangat menunjang agar calon penerima bantuan mengetahui dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai serta mengetahui apa yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya menurut pernyataan IK dapat kita simpulkan bahwa TFL melakukan verifikasi penerima bantuan setelah penetapan penerima bantuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada yakni pada tahap penyiapan Masyarakat prosesnya adalah sosialisasi/penyuluhan kemudian verifikasi calon

penerima, kemudian kesepakatan calon penerima bantuan lalu identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.

. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan, peneliti melakukan wawancara dengan penerima bantuan, berikut pernyataannya:

“Dana yang diberikan sebanyak Rp. 15.000.000 namun uang itu salurkan melalui buku rekening dan langsung dibelanjakan di toko bangunan yang sudah ditentukan. Untuk kendalanya itu dana yang diberikan tidak maksimal penggunaannya karena kami juga membayar tukang ditambah lagi karena kita di pegunungan dan jalannya masih rusak sewa angkut bahan-bahan bangunan lumayan menguras dana juga” (JK, 12 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa total dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya telah sesuai dalam juknis yang ada. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan yang terlalu banyak digunakan bukan pada peruntukannya. Lanjutnya lagi:

“Kalau dari KPB tidak ada yang datang saling membantu tetapi warga yang ada dilingkungan saya dan juga kerabat yang datang membantu” (JK, 12 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui dalam proses pelaksanaan tidak dilakukan secara swadaya dengan Kelompok Penerima Bantuan. Namun penerima bantuan mendapat melakukan swadaya dengan kerabat dan warga dilingkungan penerima bantuan. Selanjutnya pernyataan dari AS:

“Kita menerima uang yang ditransfer dibuku tabungan, kemudian dicairkan secara langsung dengan membeli

bahan bangunan di toko yang telah ditentukan. Saya terkendala di pembangunannya karena saya ini seorang janda dan tidak ada yang membantu, jadi saya harus bayar tukang untuk memperbaiki rumah” (12 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses penyaluran dana telah sesuai dengan petunjuk teknis yaitu dalam pencarian bantuan dilakukan dengan mengambil langsung bahan bangunan di tokoh bangunan yang telah ditentukan oleh pelaksana bantuan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pegawai yang menangani program BSPS:

“Untuk proses penyaluran dananya kami mengajukan nama-nama penerima bantuan kemudian diperiksa oleh inspektorat setelah proses itu selesai nanti penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), kemudian disalurkan ke kas daerah. Nanti kas daerah mentransfer ke nomor rekening si penerima.” (WP,14 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa proses penyaluran dana telah sesuai dengan juknis yang ada. Lanjutnya lagi:

“Kalau penggunaan dana penerima tidak boleh mangambil langsung uang tunai tanpa penggunaan yang jelas,nanti dari rekening diurus bersama fasilitator untuk melakukan transaksi pembelian bahan-bahan yang diperlukan di toko, metode pembayarannya itu langsung transfer sehingga penerima tidak akan memegang uangnya namun langsung dibelanjakan.” (WP, 14 Juli 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap pencairan bantuan dan penyalurannya telah sesuai dengan petunjuk teknis hanya saja dalam pemanfaatannya belum terlalu

maksimal karena penggunaan dananya terlalu banyak digunakan dalam teknis seperti pembayaran upah yang terlalu banyak karena kurangnya swadaya serta kondisi geografis Lembang Bululangkan yang cukup jauh dari toko yang ditentukan sehingga menambah pengeluaran dana.

Dari pengamatan peneliti letak geografis memang cukup jauh daerah pusat perkotaan dan juga akses jalanan ke Lembang Bululangkan memang memakan waktu sekitar 1 jam lebih menggunakan kendaraan roda dua dengan kondisi jalanan yang cukup terjal.

Selanjutnya pernyataan dari LC:

“dalam pelaksanaan perbaikan TFL datang melakukan pemeriksaan kadang juga lembang , setelah itu setelah perbaikan selesai difoto kembali untuk laporan” (12 Juli 2022)

Berikutnya pernyataan dari DA selaku kepala lembang

“selama perbaikan memang saya yang sering memantau pelaksanaannya karena rumah TFL agak jauh ditambah waktu sedang perbaikan jalan poros jadi beliau jarang datang. Kadang saya hanya mengirimkan dokumentasi saja lewat WA” (11 Juli 2022)

Dari pernyataan diatas pada tahap pengawasan dan pelaporan tidak dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Padahal pengawasan harusnya dilakukan oleh TFL, namun begitu pelaporan program BSPS tetap selesai dengan baik dengan adanya kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah setempat.

Jumlah penerima BSPS di Lembang Bululangkan sebanyak 50% dari jumlah rumah tidak layak huni yakni sebanyak 25 penerima dari 51 rumah tidak layak huni. Penerima BSPS adalah masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhimpun dalam Keluarga Penerima Bantuan (KPB) yang berjumlah 10-15 orang dan sudah melalui tahap kualifikasi dan verifikasi yang telah ditentukan berdasarkan surat edaran Kementerian PUPR No.7 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam proses pelaksanaannya Kementerian PUPR menyalurkan program BSPS melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara Bidang Perumahan yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat di Lembang Bululangkan melalui fasilitator lapangan. Dimana pemerintah setempat memberikan data MBR yang memiliki rumah tidak layak huni di Lembang Bululangkan lalu kemudian fasilitator memverifikasi dan membuatkan rekening sebagai salah satu syarat menerima bantuan.

Total dana bantuan program ini Rp 15.000.000,- , dana tersebut disalurkan melalui rekening masing-masing penerima yang dikonversikan dengan cara membelanjakannya di Toko bangunan yang telah ditentukan. Penerima membeli bahan-bahan bangunan untuk keperluan perbaikan rumah KPB. Perbaikan rumah ini merupakan bentuk dukungan peningkatan kualitas rumah yang diberikan dalam program BSPS di Lembang Bululangkan. Dalam proses pelaksanaan perbaikan peningkatan

rumah, penerima yang terhimpun dalam KPB didampingi oleh fasilitator lapangan beserta pemerintah setempat untuk melaksanakan BSPS.

Pada temuan dilapangan pada proses penyiapan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Yaitu tidak dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan kepada MBR, akibatnya masyarakat kurang paham tentang program bantuan yang mereka dapatkan. Selain itu TFL tidak melakukan kesepakatan dengan CPB, pembentukan KPB hanya untuk kelengkapan persyaratan saja namun karena tidak adanya kesepakatan untuk menjalankan fungsi bergotong royong, tanggung jawab renteng, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara kelompok dalam melaksanakan program BSPS. Akibatnya penerima BSPS melakukan pembangunan dengan hanya mengandalkan tenaga tukang saja yang tentunya membutuhkan dana yang lebih dalam operasional dan teknisnya.

Selain itu TFL melakukan verifikasi penerima bantuan setelah penetapan penerima bantuan. Hal tersebut tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Dari hasil observasi peneliti hal ini dipicu oleh jarak rumah TFL dengan Lembang Bululangka ditambah dengan kondisinya yang berada dipegunungan sehingga akses yang dilalui oleh TFL agak sulit. Seperti temuan di lapangan yang melakukan pengawasan dominan aparat pemerintah setempat dikarenakan akses TFL cukup jauh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan penyaluran Program BSPS di Lembang Bululangkan, Kecamatan Rindingallo, Kabupaten Toraja Utara belum optimal. Adapun penjelasannya mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo kurang maksimal

a. Peningkatan kualitas rumah tercapai dengan baik, setelah menerima program BSPS MBR telah menempati rumah dengan aspek fisik dan mentalnya telah memenuhi SNI

b. Mendorong Swadaya MBR

Tujuan ini belum tercapai pada penyaluran BSPS di Lembang Bululangkan. Kurangnya swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah karena tidak adanya sosialisasi/penyuluhan kepada MBR sehingga masyarakat kurang tahu tentang program BSPS ini. Selain itu tidak adanya kesepakatan dengan KPB sehingga penerima bantuan melakukan perbaikan secara mandiri (tidak berswadaya)

2. Proses proses penyaluran

Proses penyaluran program BSPS di Lembang Bululangkan hanya mengacu pada Surat Edaran No.7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hal ini dikarenakan belum rampungnya SOP di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara.

Namun ada beberapa tahapan yang pelaksanaannya tidak sesuai yaitu tidak dilakukannya sosialisasi atau penyuluhan kepada MBR, akibatnya masyarakat kurang paham tentang program bantuan yang mereka dapatkan. Selain itu TFL tidak melakukan kesepakatan dengan CPB, pembentukan KPB hanya untuk kelengkapan persyaratan saja namun karena tidak adanya kesepakatan untuk menjalankan fungsi bergotong royong, tanggung jawab renteng, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara kelompok dalam melaksanakan program BSPS. Akibatnya penerima BSPS melakukan pembangunan dengan hanya mengandalkan tenaga tukang saja yang tentunya membutuhkan dana yang lebih dalam operasional dan teknisnya.

Tidak terlaksananya beberapa tahapan ini dipicu penempatan TFL oleh letak geografis, yaitu lokasi TFL yang cukup jauh dengan Lembang Bululangkan yang mengakibatkan ketidak mampuan sumberdaya dalam pelaksanaan tugasnya. Ditambah dengan kondisi jalanan yang masih dalam perbaikan pada saat itu, sehingga TFL mengefisienkan waktu dengan tidak melakukan beberapa tahapan.

B. Saran

Berdasarkan dengan apa yang telah peneliti temukan dilapangan selama penelitian, peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin akan bisa menjadi bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Progrm BSPS di Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. Berikut beberapa sarannya:

1. Pencapaian tujuan program BSPS di Lembang Bululangkan
 - a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada MBR terkait program BSPS agar masyarakat mengetahui apa tujuan tentang program BSPS ini
 - b. Memberikan peringatan atau tindakan tegas kepada kelompok penerima bantuan agar tidak menyepelekan swadaya dalam pelaksanaan BSPS
2. Proses penyaluran program BSPS di Lembang Bululangkan
 - a. Perlunya evaluasi terhadap TFL terkait pelaksanaan tanggung jawabnya agar pelaksanaan program ini berjalan dengan baik
 - b. Perlu adanya transparansi dalam penentusn CPB dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran program ini
 - c. Pelaksana program membuat SOP penyaluran program BSPS agar dapat menjadi acuan pelaksanaan program ini agar apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan dan tujuan dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aji, Firman B.. 2010, *Perencanaan dan Evaluasi (PDE)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dunn, William N.. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hawiyah, Siti. 2016. *Evaluasi Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2014*. Skripsi. Batam: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Herlina, Dewi. 2021. *Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Menyediakan Rumah Layak Huni di Kelurahan Borohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi*. Deli Serdang: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Midgley, J. C. (2010). *Social Work and Social Development: The Theories and Skills for Development Social Work*. University Press..
- Nugroho, Riant. 2010. *Perencanaan Strategis In Action*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oemar, Hamalik. 2003. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Perilaku Organisasional: Teori, Kuesioner dan Proses*

Analisis Data. Yogyakarta: Yogyakarta Center For Academic Publishing Service.

Tambunan, R. M. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Maistas Publishing.

Tayibnapi, Farida Yusuf. 2010. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Med Press.

Wirawan. 2012. *Evaluasi; Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yosita, Lucy. 2012. *Strategi Perencanaan dan Perancangan Perumahan Pada era Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

Dokumen

Peraturan Menteri PUPR No.7 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman

Surat Edaran Menteri PUPR No.7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Internet

<https://perkim.id/rtlh/definisi-rumah-tidak-layak-huni/> (Diakses pada tanggal 11

Agustus 2022 pukul 22.34 WITA)





LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Judul Penelitian:

“EVALUASI PENYALURAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI LEMBANG BULULANGKAN KECAMATAN RINDINGALLO KABUPATEN TORAJA UTARA”

A. Pencapaian tujuan program BSPS

1. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
 - a. Bagaimana perubahan nyata yang dirasakan setelah menerima program BSPS?
2. Mendorong Swadaya Masyarakat berpenghasilan Rendah
 - a. Apakah ada Kelompok Penerima Bantuan yang dibentuk TFL? Jika ada berapa anggota per kelompok?
 - b. Apakah KPB yang dibentuk melakukan swadaya dalam perbaikan rumah?

B. Proses Penyaluran BSPS (Juknis)

1. Persiapan
 - a. Bagaimana bentuk sosialisasi program BSPS di Lembang Bululangkan?
 - b. Bagaimana proses verifikasi calon penerima bantuan BSPS di Lembang Bululangkan?
 - c. Bagaimana penentuan kelompok penerima bantuan di Lembang Bululangkan?

- d. Bagaimana penetapan calon penerima bantuan di Lembang Bululangkan

2. Pelaksanaan

- a. Bagaimana pencairan dana bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan?
- b. Bagaimana penyaluran dana bantuan BPS di Lembang Bululangkan?
- c. Bagaimana pemanfaatan bantuan BPS di Lembang Bululangkan?
- d. Bagaimana pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Lembang Bululangkan?


3. Pelaporan

- a. Bagaimana pelaporan dari program BPS di Lembang Bululangkan?

Lampiran 2. Daftar Informan

No.	Kode Penelitian	Status
1.	DA	Kepala Lembang Bululangkan
2.	PT	Kepala Seksi Kesejahteraan Lembang Bululangkan
3.	WP	Penanganan BSPS pada Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan Toraja Utara
4.	MA	Penerima BSPS
5.	IK	Penerima BSPS
6.	SA	Penerima BSPS
7.	LC	Penerima BSPS
8.	EL	Penerima BSPS
9.	JR	Penerima BSPS
10.	JK	Penerima BSPS
11.	LR	Penerima BSPS
12.	NI	Penerima BSPS
13	AS	Penerima BSPS

Lampiran 3. Surat keterangan selesai meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**
KECAMATAN RINDINGALLO
LEMBANG BULULANGKAN
Alamat : Bululangkan, jln Poros Pangala- Sarambu


SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI
Nomor :077 /LBL/SKP/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembang Bululangkan Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa :

Nama : Santi Langgan
Nim : 4518021025
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa UNIBOS Makassar

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian di Lembang Bululangkan selama 21 hari,dengan Judul Penelitian "Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Lembang Bululangkan,Kecamatan Rindingallo,Kabupaten Toraja Utara".

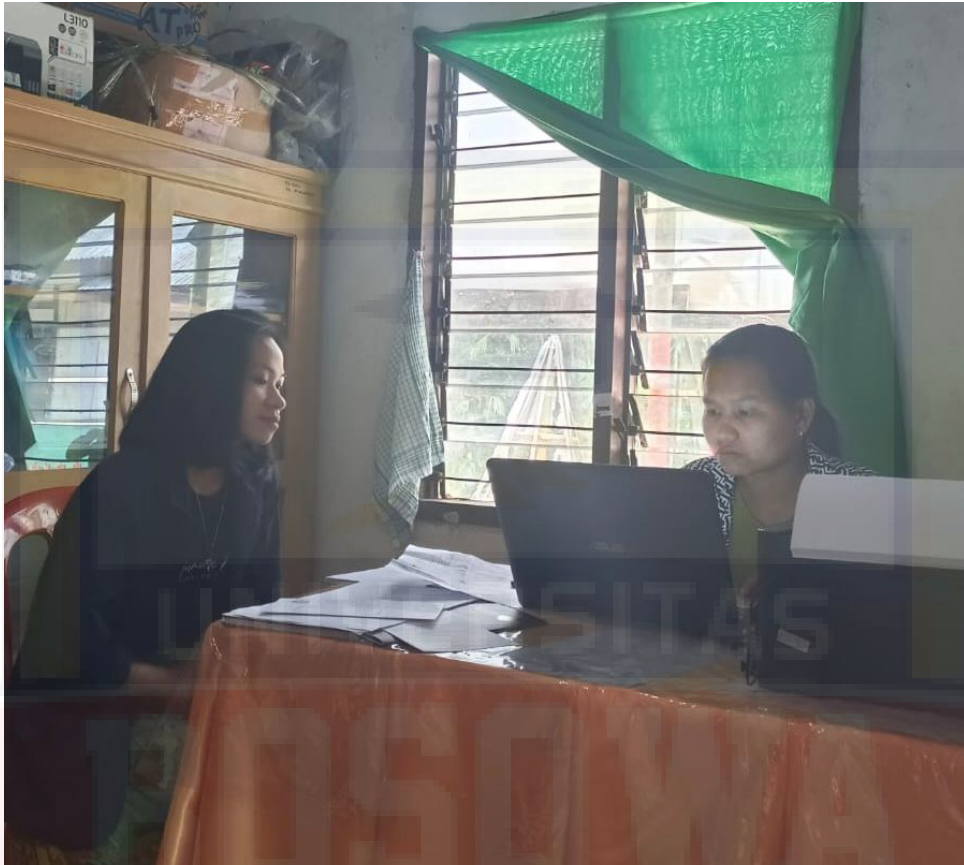
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Bululangkan,11 Juli 2022
Kepala Lembang

DARIUS PARURA

Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Lembang Bululangkan terkait penyaluran BPNT di
Lembang Bululangkan pada 11 Juli 2022



Pengambilan arsip data yang diperlukan di Lembang Bululangkan pada tanggal 11

Juli 2022



Konfirmasi dengan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Toraja Utara untuk melakukan penelitian 14 Juli 2022



Wawancara dengan penanggung Jawab BPS Bidang Perumahan Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara pada 14 Juli 2022



Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022



Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022



Wawancara dengan penerima BSPS 12 Juli 2022



Kondisi salah satu penerima program BSPS yang sebelumnya adalah korban bencana kebakaran dan telah diperbaiki (16 Juli 2022)



Wawancara dengan penerima BSPPS 12 Juli 2022



RIWAYAT HIDUP

Santi Langngan adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara dari pernikahan Ayahanda Langngan dan Ibunda Dorkas Lepong. Yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2000 di Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara.

Penulis dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu ciri khas cultur masyarakat Desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan para leluhur secara turun-temurun. Dibesarkan dalam masyarakat adat menjadi keuntungan tersendiri bagi penulis karena dapat belajar banyak hal dari para petua-petua masyarakat adat dan dengan wejangan-wejangan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis mulai dari sekolah dasar yakni SDN 6 Rindingallo pada tahun 2006-2012. Setelah itu dilanjutkan ke SMPN 1 Rindingallo pada tahun 2012-2015. Kemudian dilanjutkan ke jenjang tingkat menengah yaitu SMAN 4 Toraja Utara pada tahun 2015-2018. Setelah menyelesaikan studi pada jenjang tingkat menengah penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian memilih Sulawesi Selatan/Makassar sebagai tempat tujuan untuk melanjutkan studi dan mendaftar pada Perguruan Tinggi Swasta Swasta tepatnya di Universitas Bosowa Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, penulis banyak berkecimpung di dunia kelembagaan kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus.

Pada tahun 2018, penulis mulai aktif didunia organisasi. Organisasi yang pertama kali penulis dapatkan sebagai tempat berlabuh dan belajar banyak hal yaitu organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) yang merupakan salah satu organisasi intra kampus Universitas Bosowa. Pada Tahun 2019 penulis bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa dan juga Himpuna Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bosowa. Pada tahun 2021 penulis diberi mandat menjadi Kepala Bidang Humas Desain Komunikasi Visual di Himpuan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Bosowa. Kemudian, pada tahun 2022 penulis diberi mandat menjadi kepala bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia di Persatuan Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial Cab. Makassar.

Penulis juga aktif di beberapa program kampus merdeka yang diadakan oleh KEMENDIKBUDRISTEK yakni pada awal tahun 2021 penulis menjadi peserta Kampus Mengajar batch 1 yang ditempatkan di UPT SPF SDN Inpres Pagandongan 1 selama tiga bulan. Pada akhir tahun 2021 penulis menjadi peserta Pejuang Muda di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tiga bulan, program ini berkolaborasi dengan KEMENSOS RI. Pada awal 2022 penulis menjadi peserta MSIB Batch 2 yakni magang di KEMENDAGRI yang disebut Penggerak Muda Pasar Rakyat yang ditempatkan di Kabupaten Gowa selama 5 bulan.

Setelah kurang lebih empat tahun menempuh pendidikan pada S1 program pendidikan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bosowa maka penulis berkewajiban untuk menyelesaikan studi

tersebut. Proses penyelesaian studi tersebut melalui proses penelitian dan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi. Akhir dari semua proses dan syarat untuk menyelesaikan studi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan dilaksanakannya ujian skripsi dengan judul, Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Lembang Bululangka Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).

